

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI : ANALISIS FILSAFAT KEADILAN TERHADAP AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK PAPUA DISTRIK MBUA KABUPATEN NDUGA

Rini Puspasari *¹

¹ Program Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

*e-mail: [rinipuspasari14@gmail.com](mailto:riniuspasari14@gmail.com)

Abstrak

Pendidikan dan Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara universal, termasuk dalam konteks Indonesia. Namun, realitas menunjukkan bahwa akses Pendidikan di wilayah Papua, khususnya di Distrik Mbu, Kabupaten Nduga, masih jauh dari kata ideal. Penelitian ini bertujuan menganalisis akses Pendidikan bagi anak – anak di Distrik Mbu melalui pendekatan filsafat keadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dilakukan analisis antara data dan informasi tentang Distrik Mbu yang dihubungkan dengan beberapa data relevan serta laporan yang telah dipublikasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan Pendidikan di Distrik Mbu disebabkan oleh geografis, minimnya tenaga pendidik, fasilitas Pendidikan yang tidak memadai, serta kebijakan Pendidikan yang belum berpihak sepenuhnya pada Masyarakat. Dalam perspektif filsafat keadilan, ketimpangan ini mencederai prinsip keadilan distributif dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang kontekstual dan berkeadilan untuk memastikan hak asasi Pendidikan bagi anak – anak Papua benar – benar terpenuhi.

Kata kunci: *Mbu, Papua, Hak Asasi, Filsafat, Pendidikan, Kesehatan*

Abstract

Education and Health is a universally guaranteed human right, including in the context of Indonesia. However, reality shows that access to education in the Papua region, especially in Mbu District, Nduga Regency, is still far from ideal. This study aims to analyze access to education for children in Mbu District through a philosophy of justice approach. The research method uses a qualitative descriptive which is analyzing some data and information about Mbu District and correlate with the relevant data and official report from central and regional government. The results of the study show that educational inequality in Mbu District is caused by geography, lack of educators, inadequate educational facilities, and educational policies that have not fully sided with the community. From the perspective of the philosophy of justice, this inequality violates the principles of distributive justice and social justice. Therefore, contextual and equitable affirmative policies are needed to ensure that the basic rights to education for Papuan children are truly fulfilled.

Keywords: *Mbu, Papua, Human Rights, Philosophy, Educational, Health*

PENDAHULUAN

Jika kita mengkaji mengenai Hak Asasi Manusia, secara sederhana adalah hak dasar yang dimiliki sejak lahir, dimana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hak-hak dari HAM sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara dan perlindungan terhadap HAM telah dilakukan dalam hukum nasional berbagai negara dan dalam hukum internasional. HAM merupakan suatu hak yang harus berlaku adil kepada setiap masyarakat termasuk anak (bagian dari masyarakat), dan didalam pemikiran tradisional hak itu berlaku adil. Konsep Traditional mengenai keadilan tampaknya diabaikan oleh teori yang mengklaim benarnya tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan ini. Tetapi dalam kehidupan nyata keadilan ini seperti tataran ungkapan serta topik-topik hangat dalam berbicara, realisasinya nol⁽¹⁾

Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam akses Pendidikan, terutama di Tingkat dasar dan

menengah, masih terdapat masalah dalam hal mutu Pendidikan, kesenjangan antar wilayah, dan ketidakmerataan akses Pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini diperparah dengan kondisi geografis dan sosioekonomi yang beragam di Indonesia, yang menyebabkan Pendidikan di daerah – daerah tertentu, termasuk Provinsi Papua, mengalami kendala yang cukup kompleks.⁽²⁾

Pendidikan di Indonesia juga mendapat perhatian khusus karena dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit tercantum bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian tanggung jawab negara. Pada *The Universal Declaration of Human Rights* pasal 26 serta pada Undang-Undang Dasar Pasal 31 dinyatakan bahwa Pendidikan dan Kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara. Salah satu bunyinya adalah “setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan, terutama Pendidikan dasar dan sekolah rendah” kemudian “Pendidikan harus mendorong toleransi, persahabatan, dan saling pengertian di antara semua bangsa, kelompok ras, dan agama. Namun, implementasi hak pendidikan di wilayah – wilayah terpencil seperti Distrik Mbu, Kabupaten Nduga, Papua masih menghadapi tantangan serius dan belum dinikmati oleh Masyarakat secara merata. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak, namun kurang meratanya pendidikan di Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan yang nantinya akan berimbas pada kesenjangan social.

Secara historis, wilayah Papua, khususnya Nduga, memiliki akses Pendidikan yang terbatas akibat kondisi geografis, infrastruktur Pendidikan yang minim, hingga ketidakadilan structural. Dalam konteks filsafat keadilan, akses Pendidikan yang tidak merata mencerminkan ketidakadilan social yang merugikan kelompok Masyarakat adat di daerah pedalaman. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji Pendidikan sebagai hak asasi melalui perspektif filsafat keadilan guna memahami akar masalah serta merumuskan solusi yang kontekstual dan berkeadilan.

Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap provinsi, Pendidikan yang dapat diakses di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut Indeks Pembangunan Manusia diseluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2021 - 2024, DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki angka peningkatan IPM yang paling tinggi, yaitu sebesar 84,15% sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada provinsi Papua Pegunungan memiliki angka IPM yang paling rendah yaitu sebesar 54,43%.⁽³⁾

Tabel 1.
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi pada Tahun 2021 - 2024

Provinsi (1)	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)	2024 (5)
Aceh	73,48	74,11	74,70	75,36
Sumatera Utara	73,84	74,51	75,13	75,76
Sumatera Barat	74,56	75,16	75,64	76,43
Riau	73,89	74,45	74,95	75,67
Jambi	72,62	73,11	73,73	74,36
Sumatera Selatan	71,83	72,48	73,18	73,84
Bengkulu	73,16	73,68	74,30	74,91
Lampung	71,25	71,79	72,48	73,13
Kepulauan Bangka Belitung	72,96	73,50	74,09	74,55
Kepulauan Riau	77,87	78,48	79,08	79,89
DKI Jakarta	82,25	82,77	83,55	84,15
Jawa Barat	72,96	73,63	74,24	74,92
Jawa Tengah	72,17	72,80	73,39	73,87
D.I. Yogyakarta	80,22	80,65	81,09	81,62
Jawa Timur	73,48	74,05	74,65	75,35
Banten	74,68	75,25	75,77	76,35
Bali	76,69	77,40	78,01	78,63

Nusa Tenggara Barat	70,86	71,65	72,37	73,10
Nusa Tenggara Timur	67,02	67,63	68,40	69,14
Kalimantan Barat	68,99	69,71	70,47	71,19
Kalimantan Tengah	72,81	73,17	73,73	74,28
Kalimantan Selatan	73,45	74,00	74,66	75,19
Kalimantan Timur	76,60	77,36	78,20	78,79
Kalimantan Utara	71,57	72,21	72,88	73,41
Sulawesi Utara	74,03	74,52	75,04	75,68
Sulawesi Tengah	70,54	71,01	71,66	72,24
Sulawesi Selatan	73,38	73,96	74,60	75,18
Sulawesi Tenggara	71,82	72,38	72,94	73,62
Gorontalo	69,82	70,62	71,25	72,01
Sulawesi Barat	68,64	69,19	69,80	70,46
Maluku	71,55	72,04	72,75	73,40
Maluku Utara	69,56	70,26	70,98	71,84
Papua Barat	66,11	66,03	66,84	67,69
Papua Barat Daya	-	68,60	69,07	69,65
Papua	61,40	72,57	73,23	73,83
Papua Selatan	-	67,39	68,24	68,86
Papua Tengah	-	58,76	59,44	60,25
Papua Pegunungan	-	52,69	53,45	54,43
Indonesia	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Indonesia, 2024

Syafii (2018) mengatakan, bahwa memang masih banyak terdapat daerah terdepan, terluar dan tertinggal yang membutuhkan banyak sentuhan Pendidikan baik itu akses maupun mutu. Untuk menuju Pendidikan yang bermutu hal pertama yang harus dipenuhi yaitu penyetaraan akses Pendidikan. Artinya untuk mencapai Pendidikan yang bermutu, penyetaraan akses Pendidikan harus diselesaikan terlebih dahulu.

Terdapat beberapa uraian penting dalam kajian ini yaitu: 1) Bagaimana kondisi akses pendidikan dan Kesehatan bagi anak-anak di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, 2) Bagaimana analisis filsafat keadilan terhadap realitas pendidikan dan Kesehatan di Distrik Mbua, 3) Bagaimana strategi kebijakan berkeadilan untuk meningkatkan akses pendidikan dan Kesehatan bagi anak-anak Papua. Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggabungkan strategi tinjauan Pustaka. Data didapatkan dari berbagai jurnal penelitian terdahulu yang relevan serta data dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2024 yang diperoleh dan diintegrasikan dari berbagai sumber data di Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah, dan institusi lain dengan menerapkan prinsip-prinsip kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) selama tahun 2024.

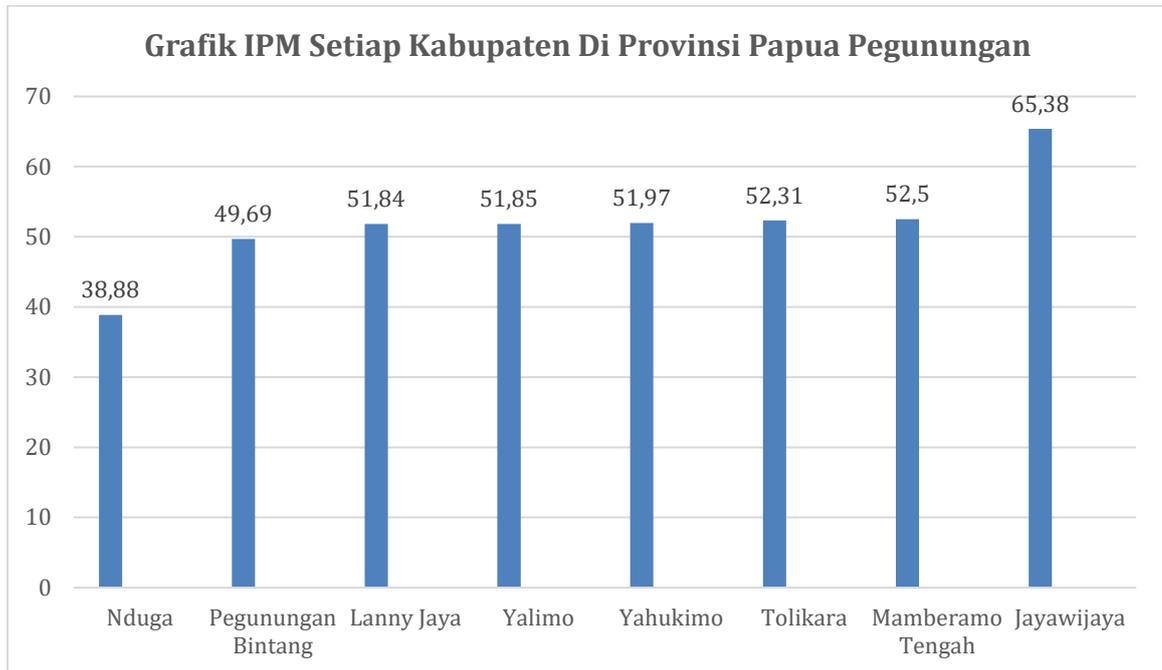
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Akses Pendidikan di Distrik Mbua

Dalam pengukuran keberhasilan daerah untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan akses yang luas pada pendidikan, maka dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan. Hal ini dapat diketahui dengan angka Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Papua Pegunungan.

1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan

Provinsi Papua memiliki IPM paling rendah dipengaruhi oleh IPM pada kabupaten Papua, yaitu pada kabupaten Pegunungan Bintang memiliki IPM sebesar 49,69% dan Kabupaten Nduga sebesar 38,88%.



Sumber: BPS Indonesia, 2024

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa kabupaten Nduga memiliki angka IPM paling rendah diantara kabupaten lainnya di provinsi Papua pegunungan. Diperlukan Upaya yang konkrit dalam mengejar ketertinggalan dalam pemerataan akses Pendidikan. Dari sumber yang diperoleh juga menunjukkan akses pendidikan dan kesehatan di Distrik Mbua Kabupaten Nduga sangat memprihatinkan. Beberapa temuan diantaranya:

a. Infrastruktur yang minim

Fasilitas yang tersedia belum memadai untuk mendukung proses belajar – mengajar serta pelayanan kesehatan yang layak. Seperti bangunan sekolah yang rusak, bangunan puskesmas yang tidak memadai, keterbatasan alat kesehatan dan obat – obatan, kekurangan buku, kekurangan alat tulis, kekurangan tempat duduk, serta fasilitas belajar yang jauh dari layak.

b. Kekurangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan

Banyak guru dan tenaga kesehatan yang enggan mengajar di wilayah terpencil karena alasan keamanan dan kesejahteraan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa orang dari luar papua yang mempunyai jiwa tulus untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang pengajar dengan sebutan Bapak Guru walaupun bukan dari seorang pegawai yang kemudian berani menetap dan mengajari anak – anak pedalaman dengan semua kemampuannya hingga beliau membuat edukasi di media sosial dengan tujuan semua mata dunia melihat bahwa anak – anak pedalaman papua sangat memerlukan pendidikan yang layak.

c. Ketidakhadiran Tenaga Pengajar dan Tenaga Medis

Banyak guru dan petugas medis dari pegawai daerah tersebut tidak berada di tempat tugas mereka, mereka hanya berada di tempat tugas satu hingga tiga bulan atau jika

akan datang waktunya ujian kenaikan kelas ataupun kelulusan siswa maupun siswi, sehingga layanan pendidikan dan kesehatan tidak berjalan optimal.

d. Kondisi Geografis Sulit

Distrik Mbua terletak di daerah pedalaman dengan infrastruktur yang terbatas, sehingga akses menuju dan dari wilayah ini menjadi sulit. Jarak dari kota wamena menuju Distrik Mbua sendiri jika ditempuh dengan menggunakan roda 4 adalah ± 7 jam dengan melewati lembah dan jalanan terjal hingga hutan belantara. Begitupun dengan jarak rumah masyarakat ke sekolah yang jauh dan medan berat karena rumah masyarakat Distrik Mbua berada di lereng gunung ataupun di kampung sebelah Distrik Mbua yang jaraknya juga cukup jauh ditempuh dengan berjalan kaki sehingga menyebabkan anak – anak enggan atau kesulitan untu bersekolah.

e. Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah Daerah

Pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan dan kesehatan, berkontribusi pada rendahnya kualitas layanan publik pada Distrik ini.

f. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendidikan

Kesadaran Masyarakat setempat mengenai pentingnya pendidikan masih rendah, yang berdampak pada partisipasi dan dukungan terhadap proses pendidikan.

g. Situasi Keamanan yang Tidak Stabil

Ketidakstabilan keamanan di wilayah ini menyebabkan ketakutan dan ketidaknyamanan bagi tenaga pendidik dan masyarakat, yang menghambat proses pendidikan.

h. Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Masalah Kesehatan

Distrik Mbua pernah mengalami KLB yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, termasuk anak – anak, sehingga mengganggu aktifitas pendidikan.

2. Analisis Filsafat Keadilan

Dalam perspektif John Rawls (*A Theory of Justice*, 1971) memperkenalkan dua prinsip utama keadilan : prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan difference principle, dimana ketimpangan sosial harus diarahkan untuk kelompok paling rentan (anak – anak Papua) tidak memperoleh manfaat maksimal dari sistem pendidikan nasional. Negara seharusnya menghadirkan kebijakan afirmatif dan pendekatan distribusi sumber daya yang adil. Senada dengan Rawls, Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menekankan bahwa pendidikan adalah bentuk kebebasan substantif untuk manusia berkembang secara utuh. Ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan di Distrik Mbua berarti menghambat pembangunan manusia seutuhnya.

Sementara menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan hak sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing – masing. Dalam konteks Papua, kebutuhan anak – anak di daerah pedalaman jauh lebih besar, namun justru mendapatkan perhatian paling kecil. Hal ini menciptakan ketidakadilan distributif yang memperdalam kesenjangan sosial.

3. Strategi Kebijakan Berkeadilan

Agar pendidikan dan kesehatan di Distrik Mbua dapat mencerminkan prinsip keadilan dan berjalan dengan seadil adilnya, beberapa strategi perlu dilakukan:

a. Keadilan Distributif (Aristoteles)

Berprinsip memberikan sesuai dengan apa yang menjadi hak atau kebutuhan setiap orang, berdasarkan kondisi dan konteksnya.

Strategi Implementasi:

- Alokasi anggaran khusus (Dana Otonomi Khusus) diarahkan lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan di daerah DTPK seperti Distrik Mbua.

- Distribusi fasilitas pendidikan dan kesehatan (buku, alkes, obat – obatan, sarana belajar, teknologi) berbasis kebutuhan riil dan hambatan geografis. Contohnya, sekolah di daerah sulit dijangkau maka perlu mendapatkan perlengkapan belajar digital (misal tablet dengan konten offline) agar akses pengetahuan lebih merata
- Insentif lebih besar bagi guru dan tenaga kesehatan yang mau mengabdikan di daerah terpencil (keadilan kompensasi).

b. Keadilan Sosial (John Rawls)

Berprinsip ketimpangan sosial itu boleh terjadi *hanya jika* ketimpangan tersebut bermanfaat bagi kelompok yang paling lemah/miskin/marginal (difference principle).

Strategi Implementasi:

- Kebijakan Afirmasi Pendidikan dan kesehatan Papua: Dengan menyiapkan beasiswa afirmasi khusus anak Distrik Mbua dari SD sampai Perguruan Tinggi.
- Pemberdayaan Guru dan Nakes Lokal: Dengan merekrut dan mendidik anak – anak asli Mbua menjadi guru, tenaga kesehatan agar mereka bisa kembali mengajar dan mengabdikan di kampung halaman sendiri. Dengan demikian mengurangi ketergantungan pada guru dan nakes dari luar yang sering enggan bertugas lama di pedalaman.
- Sekolah berbasis komunitas adat: Misalnya dengan membentuk sekolah berbasis adat dan budaya Mbua, di mana pendidikan formal dikombinasikan dengan pendidikan adat.

c. Keadilan Prosedural (Immanuel Kant)

Berprinsip setiap kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif dari pihak yang terdampak. Seperti anak – anak, orangtua, tokoh adat, dan masyarakat Mbua harus dilibatkan sejak awal dalam proses perumusan kebijakan pendidikan dan kesehatan.

Strategi Implementasi:

- Musyawarah Adat Pendidikan dan kesehatan: Dilakukan sebelum merancang program pendidikan dan kesehatan, pemerintah duduk bersama masyarakat adat untuk memahami kebutuhan, hambatan, dan harapan mereka terhadap pendidikan dan kesehatan.
- Sekolah Adat Berbasis Kearifan Lokal dengan kurikulum yang tidak hanya berisi pelajaran umum, tapi juga muatan lokal seperti sejarah, budaya, bahasa suku setempat.
- Monitoring Pendidikan dan kesehatan Berbasis Komunitas: Misalnya masyarakat diperdayakan sebagai pengawas pendidikan, sehingga pengelolaan pendidikan dan kesehatan bukan top-down dari pusat saja.

d. Keadilan Reformatif (Amartya Sen)

Berprinsip keadilan harus dilihat sebagai upaya membebaskan masyarakat dari hambatan struktural agar mereka punya kapabilitas nyata untuk menikmati hak pendidikan dan kesehatan.

Strategi Implementasi:

- Pembangunan Infrastruktur Berkeadilan: Seperti pemerintah perlu membangun sekolah yang tahan cuaca ekstrem, dengan akses internet berbasis satelit serta jalur transportasi yang layak.
- Asrama Pendidikan Gratis: Dengan mendirikan asrama pendidikan di kota kecamatan terdekat bagi anak – anak Mbua yang sekolahnya jauh, agar mereka bisa belajar dalam lingkungan yang lebih kondusif.

- Pendidikan Kontekstual: Seperti materi ajar disesuaikan dengan konteks hidup masyarakat Mbua, seperti pengajaran tentang pertanian lokal, peternakan, budidaya ikan, cara mengolah hasil alam, konservasi hutan, dan nilai adat.

e. Keadilan Ekologis (Eco-Justice)

Berprinsip hak pendidikan harus selaras dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Strategi Implementasi:

- Sekolah Ramah Lingkungan dan Budaya: Seperti sekolah di Distrik Mbua seharusnya dirancang menggunakan bahan lokal yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem setempat serta juga tetap dilakukan perawatan pada sekolah yang sudah berdiri.
- Muatan Lokal tentang Ekologi: Pendidikan di Mbua sebaiknya juga mengajarkan tentang pelestarian hutan, sungai, dan ekosistem, karena itu bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak Mbua.

f. Keadilan Transformatif

Berprinsip keadilan bukan sekedar memperbaiki ketimpangan sesaat, tapi benar – benar mengubah sistem dan pola pikir yang melanggengkan ketidakadilan.

Strategi Implementasi:

- Menciptakan Narasi Baru tentang Pendidikan dan kesehatan Papua: Seperti pemerintah perlu membangun narasi bahwa pendidikan dan kesehatan di Papua (khususnya Distrik Mbua) bukan sekedar kewajiban negara, tetapi juga bentuk penghormatan pada hak asasi dan martabat manusia Papua.
- Media dan Kampanye Publik: Dengan mengangkat cerita perjuangan pendidikan anak – anak Mbua melalui media nasional, agar ada dukungan lebih besar dari seluruh elemen bangsa.
- Menciptakan Role Model Anak Papua: Seperti anak – anak Mbua berhasil mengakses pendidikan tinggi harus didorong untuk kembali dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

Menurut Syafii (2018), dalam penelitian menyebutkan bahwa banyak dari wilayah Indonesia yang termasuk dalam kategori wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) belum dapat mengakses Pendidikan yang layak, hal tersebut didukung oleh data statistik serta penelitian-penelitian terdahulu. Maka dari itu, beberapa factor yang dapat mempengaruhi ketimpangan akses pada Pendidikan dapat ditindaklanjuti dengan segera. Hal tersebut akan mempengaruhi para pengambil kebijakan memutuskan tindak lanjut yang tepat. Beberapa factor tersebut diantaranya adalah: Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di daerah tersebut, Infrastruktur yang memadai, kinerja dan kesejahteraan seorang guru, dan tenaga Kesehatan, proses pembelajaran siswa, kuantitas dan kualitas bahan belajar (buku) yang memadai, adanya konflik, serta potensi daerah itu sendiri (Perdana N, 2019). Menurut data dari *Human Development Index*, Indonesia berada dibawah negara Asia Tenggara lainnya dalam kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia antara lain: proses pembelajaran belum memperoleh perhatian optimal, masih ada para pendidik tidak memahami fungsi dan tujuan dari pendidikan. Guru lebih banyak bekerja sendirian, forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) belum berfungsi optimal. Dengan tidak diketahuinya fungsi dan tujuan dari pendidikan tersebut oleh pendidik maka suatu pendidikan akan tidak terarah atau tidak mencapai suatu tujuan pendidikan (Astawa, I, N 2017). Menurut Perdana (2019), Permasalahan tersebut diakibatkan karena akses layanan yang belum terdistribusi secara merata ke daerah desa yang jauh dari perkotaan. Sedangkan faktor lainnya, yakni: kondisi akses ke sekolah, kondisi politik, kebijakan-kebijakan yang berlaku di daerah tersebut dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Hubungan Pendidikan dengan Kesehatan

Kesehatan dan pendidikan saling berkaitan erat. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan cenderung kurang mendapatkan informasi tentang Kesehatan dasar, gizi dan kebersihan. Di Distrik Mbuwa, kasus anak putus sekolah sering diikuti dengan masalah gizi buruk, anemia, dan rendahnya imunisasi (UNICEF, 2023). Pendidikan meningkatkan kesadaran akan praktik hidup sehat, pentingnya akses layanan Kesehatan, dan kemampuan membuat Keputusan yang tepat. Sebaliknya, anak yang sakit atau kekurangan gizi sering tidak dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal. Oleh demikian, integrasi layanan pendidikan dan Kesehatan sangat krusial, misalnya melalui *School-based health programs*.

Hubungan Pendidikan dengan Akses Pendidikan

Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia semakin tahun semakin naik. Namun, Provinsi Papua Pegunungan tetap berada diposisi terbawah, hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan pada daerah tersebut masih belum berkualitas. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan." Artinya, setiap anak usia sekolah berhak mendapatkan Pendidikan yang layak. Setiap individu berhak mendapatkan pengetahuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Hal ini karena Pendidikan merupakan investasi untuk membangun Masyarakat yang Tangguh. Artinya, seluruh warga negara Indonesia, harus mendapatkan pendidikan yang merata tanpa memandang suku dan agama. Sebagai pemerintah, sudah sewajarnya untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang bermutu dan dapat mendorong potensi yang ada untuk kemajuan Indonesia dimasa yang akan datang.

menurut Setiawan, dkk (2024) pendidikan yang berkualitas merupakan suatu hak bagi manusia. Pendidikan juga merupakan solusi untuk terbebas dari kemiskinan secara ekonomi. Melalui pendidikan yang berkualitas, maka hak asasi manusia dapat dimaksimalkan, perlindungan terhadap anak-anak menjadi hal yang utama agar tidak terjadi pelanggaran dan hak-hak mereka dapat dipertahankan.⁽⁴⁾

Hubungan Pendidikan dengan Filsafat Keadilan

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Adabiyah (2022), Jika membahas tentang keadilan atas HAM maka tidak akan terlepas dari pembahasan tentang pribadi manusia itu sendiri, karena untuk memberikan keadilan atas hak manusia maka tidak jauh dari memahami seperti apa pribadi manusia, dikatakan oleh Immanuel Kant bahwa pribadi – pribadi merupakan sesuatu yang sadar akan identitas numerik mengenai dirinya sendiri pada waktu yang berbeda – beda. Hak – hak dasar yang dimiliki manusia antara lain: Hak hidup, Hak hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau di bunuh orang lain, Hak kebebasan,, Hak untuk bebas, hak untuk memiliki agama/kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat, hak berserikat dan sebagainya, Hak pemilikan, Hak untuk memilih sesuatu, seperti Pendidikan, pakaian, rumah, mobil, Perusahaan, pabrik, dan sebagainya.⁽⁵⁾

Ki Hadjar Dewantara juga pernah berpesan untuk seorang guru diharapkan agar dapat mengembangkan metode yang sesuai dalam melakukan pengajaran. Beliau memperkenalkan metode "Among", yaitu metode yang berdasarkan kepada pola asah, asih dan asuh. Maksudnya adalah seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengembangkan potensi seorang muridnya, memiliki relasi yang unggul baik kepada murid maupun komunitas yang ada disekolah tersebut. Serta seorang guru juga mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dengan sikap yang profesional sebagai seorang pendidik.⁽⁶⁾

Pendidikan juga merupakan alat mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahtera umat. Dari Pendidikan akan dihasilkan kepemimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya memperoleh Pendidikan yang merata, Pendidikan yang bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Sebuah kehidupan yang demokratis yang bisa dinikmati rakyat banyak⁽⁷⁾

Hubungan Pendidikan dengan Strategi Kebijakan Berkeadilan

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat kita ketahui bahwa masih rendahnya akses dan mutu pendidikan di Indonesia bagian timur, maka dari itu, tugas seluruh pemangku kebijakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan yang strategis agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh komponen harus memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab yang tinggi sesuai dengan perannya masing-masing untuk berupaya mengatasi hal tersebut. Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan perannya masing-masing, antara lain:

1. Peran pemerintah daerah

Pemerintah daerah merupakan pemangku kebijakan langsung sekaligus penyelenggara pendidikan di daerah, sehingga perlu secara serius memperhatikan akses maupun mutu pendidikan. Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu:

- a. Right man in the Right Place (orang yang tepat di tempat yang tepat), penempatan seorang yang sesuai dengan kompetensinya dalam memajukan pendidikan, hal ini diyakini akan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu daerah.
- b. Pembangunan sarana sekolah satu atap, strategi ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan disemua jenjang dari Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
- c. Pemerintah perlu membangun sekolah berpola asrama, Dengan demikian segala kebutuhan peserta didik bisa dikontrol dengan mudah, selain itu daya focus belajar peserta didik bisa meningkat
- d. Pengembangan kurikulum yang relevan, Kurikulum yang sesuai dengan kondisi Masyarakat daerah tertentu akan meningkatkan mutu pendidikan, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang standar kurikulum nasional yang dapat ditambahkan dengan kurikulum yang berdasarkan kepada kearifan lokal.

2. Keterlibatan masyarakat/orangtua

Proses pendidikan bersosialisasi merupakan tanggung jawab orang tua serta masyarakat di lingkungan murid tersebut tinggal. Maka, diperlukan keterlibatan orang tua serta lingkungan Masyarakat untuk mengembangkan pendidikan seorang anak.⁽⁸⁾

Hasil penelitian diperkuat adanya hubungan Pendidikan dengan strategi kebijakan berkeadilan sejalan dengan hasil penelitian Samsinar (2016), dunia hukum mengalami perubahan yang drastis dimulai pada abad ke-18, dalam dunia hukum modern, untuk bisa berhasil dalam urusan hukum, maka seseorang harus mampu memahami peraturan-peraturan hukum bahkan harus dapat mempermainkan prosedur yang berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo, hal ini merupakan tragedi hukum modern. Aspek keadilan dan kebenaran dimarginalisasi secara besar-besaran, maka diperlukan beberapa Tindakan untuk berani mengambil kebijakan untuk tidak menegakkan hukum demi tujuan hukum yang lebih besar atau *non enforcement of law*.⁽¹⁾

Peran seorang guru begitu strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, perlu juga diperhatikan kesejahteraan seorang guru, seperti pemberian gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya. Tugas sebagai pendidik merupakan tugas yang berat, Masyarakat memiliki

ekspektasi yang tinggi terhadap keberhasilan seorang guru dalam mendidik murid-muridnya, sehingga seorang guru dituntut melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya secara profesional agar peserta didiknya dapat berprestasi. Namun, fakta yang terjadi adalah sebaliknya, banyak guru yang bernasib memprihatinkan dan segala hak yang seharusnya diperoleh malah diabaikan.

KESIMPULAN

Akses Pendidikan dan Kesehatan sebagai hak asasi di Distrik Mbuwa, Kabupaten Nduga, masih jauh dari terpenuhi. Ketimpangan akses Pendidikan dan Kesehatan ini mencerminkan ketidakadilan social yang melanggar prinsip keadilan distributive dan keadilan social. Filosofi keadilan John Rawls dan Aristoteles menggarisbawahi pentingnya perhatian khusus bagi kelompok rentan, yang dalam hal ini adalah anak – anak Papua di wilayah DTPK yaitu (terpencil, pedalaman dan kepulauan). Dengan demikian, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan Pendidikan berbasis keadilan geografis dan social, dengan memperhatikan kebutuhan khusus pada wilayah DTPK. Kemudian diperlukan sinergi antara pemerintah, Masyarakat adat, dan Lembaga Pendidikan, kesehatan untuk merancang system Pendidikan kontekstual yang relevan dengan budaya local. Dan meningkatkan peran Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi keagamaan dalam mendukung Pendidikan dan kesehatan inklusif di Papua.

Perlunya keterlibatan dari semua pihak dari orang tua, Masyarakat, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk bekerjasama dalam menangani masalah akses dan ketersediaan pendidikan serta Kesehatan di Distrik Mbuwa Kabupaten Nduga ini, agar nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di Provinsi Papua Pegunungan dapat meningkat. Pendidikan dan Kesehatan tidak dapat dipisahkan dalam Upaya menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan di Papua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Masyarakat Distrik Mbuwa, khususnya para guru, tokoh adat, serta anak – anak yang telah bersedia berbagi pengalaman dan cerita selama proses penelitian berlangsung saat menjadi Tenaga Nusantara Sehat Individual. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Kementerian Kesehatan yang telah memberikan kesempatan bergabung untuk menjadi Tenaga Nusantara Sehat Individual tahun 2018. Kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak akademik yang memberikan bimbingan serta masukan dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2016). Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Doctrinal*, Vol.1(2), 208-228.
- Adabiyah, R. (2022). Keadilan Dan Hak Asasi Dalam Terang Fajar Filsafat Islam. *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*. Vol.4(1), 121-141.
- Ainia, D. (2020). Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*. Vol.3(3), 95-101.
- Astawa, I. (2017). Memahami Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*. Vol. 3(2). 197-205
- Badan Pusat Statistik. (2024). *STATISTIK INDONESIA 2024 Statistical Yearbook of Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Iriawan. (2024). *Pembangunan Bidang Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2023*. Papua: Bappeda Provinsi Papua;
- Mimin E. (2021). Strategi Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. *Thluth Sawo: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Humaniora*. Vol5(2), 55-68.
- Setiawan, E. Handayani, N. Setiyono, R. Hermansyah. Ahmad. & Widyatmike. (2024). Pemerataan Akses Pendidikan. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*. Vol.2(4), 29-38.
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*. Vol.4(2). 153-171.
- Samsinar, S. Sukarno, S. & El Widdah, M. (2021). Peran Politik dan Kebijakan Terhadap Proses Pendirian Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*. Vol.6(1). 259.